

MEDIASI DALAM HUKUM INTERNASIONAL
STUDI KASUS: MEDIASI AS DALAM KONFLIK SURIAH - ISRAEL
1991 – 2000

Oleh

Windratmo Suwarno¹

Abstrak

Peace talks between Syria and Israel can be accomplished with the support of the United States started since the Madrid Conference of 1991 to the High Level Conference in Geneva in 2000. The U.S. has done so much for his influence on Syria and Israel to give their concessions, especially the determination of boundary delimitation of the territory of the Golan Heights. Arrangements of Israeli withdrawal from the Golan Heights and the normalization of both countries was discussed and almost reached an agreement. Negotiations between Syria and Israel were difficult to reach a common ground as the principle of the sovereignty of Syria and Israel's national security has colored the failure of the Syrian-Israeli peace process.

Konflik Suriah-Israel mencapai puncaknya sejak dimulainya perang antar kedua negara yang terjadi di tahun 1967 dan kemudian berlangsung kembali pada tahun 1973. Dalam perang 1967, Israel berhasil merebut Dataran Tinggi Golan. Dalam rangka mengatasi perang tersebut, PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 336. Resolusi tersebut menjelaskan bahwa pasukan militer Israel harus mundur dari wilayah yang didudukinya dan menghentikan tuntutan negara-negara yang bersengketa dengan mengakui kedaulatan, integritas wilayah, hak kemerdekaan politik setiap negara untuk hidup damai dalam batas-batas negara dengan aman dan bebas dari ancaman serta tindakan paksaan.

Resolusi DK PBB telah mendorong Suriah dan Israel untuk melakukan upaya ke arah perundingan dalam rangka mengatasi persengketaan wilayah yang diduduki oleh Israel. Kedua negara dengan mediasi dari AS telah berhasil melakukan berbagai

¹ Penulisan ini merupakan salah satu prasyarat bagi Penulis yang sedang menyelesaikan Program Doktor pada Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Kajian Timur Tengah di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan promotor I: Prof Dr. Irwan Abdullah; Promotor II: Dr. Siti Muti'ah Setiawati, MA dan Promotor III. Prof. Dr. Bambang Cipto, MA.

perundingan dan negosiasi untuk mengatasi ketegangan atas pendudukan Israel di wilayah Dataran Tinggi Golan milik Suriah. Perundingan yang dimulai sejak tahun 1991 hingga tahun 2000 yang dilakukan melalui mediasi AS tidak dapat mencairkan ketegangan hubungan kedua negara. Kedua belah pihak telah menyampaikan berbagai persyaratan berkaitan dengan pengunduran dari wilayah tersebut namun mengapa upaya mediasi AS dalam perundingan Suriah dan Israel tidak mencapai suatu kesepakatan damai meskipun telah ada pola perundingan damai berdasarkan *land for peace* dan garis batas wilayah yang disengketakan.

Tulisan ini akan menggambarkan peran mediasi yang dilakukan oleh AS dalam perundingan damai Suriah-Israel dan menjelaskan konsensi-konsensi yang diberikan kedua belah pihak dalam mencapai kesepakatan sesuai dengan hukum internasional.

Penyelesaian Damai Dalam Hukum Internasional

Penyelesaian sengketa secara damai tercantum dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 Piagam PBB yang menjelaskan bahwa:

All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered. (Pasal 2 ayat 3) *All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.* (Pasal 2 ayat 4)

Seluruh anggota harus menyelesaikan perselisihan internasional melalui cara damai dalam arti bahwa keamanan dan perdamaian internasional serta ketidakadilan tidak terancam. Seluruh anggota hendaknya menahan dalam hubungan internasionalnya dari tindakan ancaman dan penggunaan kekuatan menghadapi integritas wilayah dan kebebasan politik setiap negara atau setiap tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.

Piagam PBB mengenai penyelesaian damai dalam menghadapi sengketa dan konflik kemudian dituangkan dalam *Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar Negara*, 24 Oktober 1970. Dalam kaitan ini terdapat perbedaan antara konflik (*conflict*) dan sengketa (*dispute*) yang khususnya terletak pada waktu dan masalah yang dihadapi. Menurut John Burton, *Disputes...suggests are short-term disagreements that are relatively easy to resolve* (sengketa adalah ketidaksetujuan yang bersifat jangka pendek yang secara relatif mudah

untuk dipecahkan). Sedangkan konflik menurut Burton: *Long-term, deep-rooted problems that involve seemingly non-negotiable issues and are resistant to resolution* (jangka panjang, masalah yang telah mengakar yang tampaknya melibatkan isu-isu yang tidak dapat dirundingkan dan sulit untuk mencari solusi).²

Dua tipe perselisihan yaitu konflik dan sengketa terjadi karena adanya keterkaitan satu dengan lainnya. Perbedaannya mendasarnya ada pada jangka waktu tetapi persamaannya adalah kedua tipe ini dapat menjurus pada perang. Sengketa melibatkan berbagai kepentingan tetapi mudah untuk melakukan negosiasi. Misalnya sengketa perbatasan antara negara A dan negara B. Masalah yang muncul tidak begitu rumit karena sengketa perbatasan dapat dipecahkan berdasarkan kesepakatan garis delimitasi antar kedua belah pihak yang bersengketa. Sedangkan konflik melibatkan isu-isu yang sulit untuk dinegosiasikan, karena mencakup moral dan perbedaan nilai, sejumlah pertanyaan yang menentukan atau mengenai siapa mendominasi siapa. Masyarakat tidak akan kompromis bila terkait dengan isu yang sangat mendasar. Mereka tidak akan mempertaruhkan untuk kehidupan yang lebih baik dengan menyerahkan keadilan dan dominasi. Konflik yang telah mengakar cenderung sulit untuk mencari penyelesaian dan dapat menimbulkan eskalasi konflik.

Konflik atau sengketa yang muncul antar negara dapat diselesaikan secara hukum dan secara politik. Penyelesaian secara hukum dapat dilakukan bila perselisihan tersebut hanya menyangkut masalah-masalah atau tuntutan suatu negara yang ada rujukannya secara jelas secara hukum internasional (yuridik). Di lain pihak dalam penyelesaian secara politik dilakukan di mana suatu negara mendasarkanuntutannya atas pertimbangan non yuridik yaitu atas dasar kepentingan keamanan nasional masing-masing negara. Dalam penyelesaian ini dilakukan melalui jasa-jasa baik (good offices) atau Mediasi. Menurut Boer Mauna dalam bukunya Hukum Internasional menjelaskan bahwa:

Jasa-jasa baik berarti intervensi suatu negara ketiga...untuk membantu penyelesaian sengketa yang terjadi diantara dua negara. Prosedur jasa-jasa baik ini dapat diminta oleh salah satu dari kedua negara yang bersengketa atau oleh kedua-duanya...Negara yang menawarkan jasa-jasa baiknya tidak ikut secara langsung dalam perundingan-perundingan, tetapi hanya menyiapkan dan

² Spangler, Brad dan Burges, Heidi (2003) *Conflicts and Disputes*, July, <http://www.beyondintractability.org/bi-essay/conflicts-disputes>. 20.01.2012

mengambil langkah-langkah yang perlu agar negara-negara yang bersengketa bertemu satu sama lain dan merundingkan sengketa. Bila pihak yang bersengketa telah setuju untuk bertemu maka berakhirnya pulalah misi negara yang menawarkan jasa-jasa baiknya tersebut.³

Sedangkan mediasi merupakan campur tangan lebih mendalam untuk menengahi sengketa antara dua negara yang bersengketa. Boer Mauna menjelaskan:

Mediasi merupakan campur tangan yang lebih nyata...Negara pihak ketiga bukan hanya sekedar mengusahakan agar negara-negara yang bersengketa bertemu, tetapi juga mengusulkan dasar-dasar perundingan dan ikut serta aktif dalam setiap perundingan. Selain itu negara mediator menggunakan pengaruhnya agar negara-negara yang bersengketa memberikan konsensi timbal-balik demi tercapainya suatu penyelesaian.

Sebelum melaksanakan negosiasi pihak, pihak yang bersengketa melakukan negosiasi untuk mencari titik temu atas masukan atau saran dari posisi masing-masing. Menurut Bercovitch negosiasi adalah *as a process by which states and other actors communicate and exchange proposals in an attempt to agree about the dimensions of conflict termination and their future relationship*.⁴ (suatu proses dimana negara dan aktor lainnya berkomunikasi dan bertukar proposal dalam upaya menyetujui untuk menghentikan suatu konflik dan hubungan mereka ke depan).

Mediasi merupakan kelanjutan dari negosiasi di mana para pihak mencari bantuan atau menerima tawaran atas bantuan dari suatu pihak yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik. Mediasi mencoba memecahkan perbedaan tanpa campur tangan dalam masalah hukum. Kunci perbedaan dari hal ini adalah terletak pada adanya tambahan sumber dan meluasnya hubungan serta komunikasi di mana mediator terlibat dalam manajemen konflik,⁵ sehingga terjadi transformasi dari *a dyadic negotiation system into a triadic mediated-negotiation system*, yang membuat berbagai kemungkinan bagi mediator untuk mempengaruhi hubungan dengan atau antara para pihak.

³ Boer, Mauna (2000) *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, tahun 2000, hal. 191.

⁴ Bercovitch, J., 1984. *Social conflicts and third parties: Strategies of conflict resolution*. Boulder, Colo: Westview Press. hal. 25-26

⁵ Wall, J., 1981. *Mediation: An analysis, review and proposed research*. *Journal of Conflict Resolution* 25: 157-180 dalam Lazaro, Maria Carmelina Londono (2003 *The Effectiveness of International Mediation*, *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, diciembre, no. 002, Pontificia Universidad Javeriana, hal-319-341 <http://redalyc.uamex.mx>

Mediasi dapat berjalan dengan efektif tergantung dari tiga keadaan. Pertama adalah *the nature of the disputes*. Dalam keadaan ini mediasi cenderung kurang berhasil jika sengketa atau konflik memiliki intensitas yang tinggi. Edmead menjelaskan bahwa *mediation is more likely to succeed if it is attempted at an early stage, just before the disputants cross a threshold of violence and begin to inflict heavy losses on each other* (mediasi cenderung lebih sukses jika diupayakan sedini mungkin sebelum pihak yang bersengketa melakukan kekerasan dan masing-masing mengalami kerugian yang cukup banyak).⁶ Kedua adalah *the nature of the parties*. Keadaan di mana semakin kecil perbedaan kekuatan antar pihak yang bersengketa, semakin tinggi efektivitas mediasi internasional. Bercovitch menjelaskan bahwa tingginya kesuksesan suatu mediasi adalah ketika kekuatan kedua pihak yang bersengketa hampir sama. Ketiga adalah *the nature of mediation*. Karakteristik mediator sangat ditentukan untuk keberhasilan suatu mediasi. Bertcovitch menganalisis bahwa upaya-upaya mediasi yang dilakukan oleh negara adikuasa lebih mungkin berhasil dari pada mediasi yang oleh negara-negara kecil dan menengah. Pengaruh dan sumber daya yang dimiliki mediator mempengaruhi kesuksesan suatu mediasi.⁷

Perbatasan Suriah –Israel

Garis perbatasan antara Suriah dan Israel terbagi atas tiga penetapan. Penetapan pertama pada garis delimitasi tahun 1923 yang banyak ikut campur dari pihak AS, Inggris dan Perancis. Kedua penetapan garis perbatasan 1949 yang disepakati ketika terjadi peperangan antara negara-negara dengan Israel yang terjadi pada tahun 1948. Ketiga, penetapan garis perbatasan 4 Juni 1967. Penetapan di akibat terjadinya penyerangan Suriah dan Mesir dalam menghadapi Israel. Ketiga penetapan garis perbatasan menjadi tolak ukur bagi Suriah untuk melukan perundingan dengan Israel. Dari gambar I secara jelas digambarkan tiga penetapan garis perbatasan antar Suriah dan Israel.

⁶ Bercovitch, J. and Houston, A, *The Study of International Mediation: Theoretical Issues and Empirical Evidence in Resolving in International Conflicts: the Theory and Practice of mediation*, (ed) Bercovitch, Jacob. Lyne Rienner Publishers, US, 1996 Lazaro, Maria Carmelina Londono (2003 *The Effectiveness of International Mediation*, *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, diciembre, no. 002, Pontificia Universidad Javeriana, hal-319-341 <http://redalyc.uamex.mx>

⁷ Bercovitch, Jacob, *Mediation Success or Failure: A Search for the Elusive Criteria*, Cardozo, J. of Conflict Resolution, Vol.7:, hal. 300.

Penetapan garis batas tahun 1923 ditetapkan berdasarkan atas negara kolonialisasi dan perang yang terjadi antara negara-negara Arab dan Israel. Dalam Resolusi Partisi PBB No. 181, 29 November 1947, garis perbatasan Israel dengan Suriah mengikuti garis internasional Inggris-Perancis tahun 1923. Di perbatasan ini, Israel mendapatkan seluruh Danau Tiberias dengan perbatasan garis batas seluas 10 meter atau sekitar 12 km. Perjanjian antara Inggris dan Perancis memberikan hak memancing, berenang dan penggunaan air Tiberias dan Hula (Bekas Danau) bagi warga Suriah dan Lebanon. Selama terjadi Perang Arab-Israel 1948, Suriah menguasai wilayah Timur Laut Danau

Gambar 1
Perbatasan Suriah Israel Berdasarkan
Garis Batas 1923, 1949 dan 1967



Sumber : **The Syrian-Israeli Frontier Relevant Lines: 1923, 1949, 1967, Monograph, Middle East Insight, (1999).**

Tiberias dan Tepi Baniyas. Pada tahun 1951, Israel mengeringkan Danau Hula dan dimasukan airnya ke Sungai Jordan. Wilayah sekitar 15.000 hektar dipergunakan untuk pertanian, menghilangkan malaria dan meningkatkan persediaan air. Sebaliknya Suriah menolak proyek tersebut karena akan menghilangkan zona penyanggah yang dapat melindungi mereka dari tank Israel. Daerah ini dapat meningkatkan kekuatan ekonomi dan militer Israel. Suriah melancarkan tekanan diplomatik dan kekuatan militer untuk menggagalkan tetapi tidak berhasil.⁸

Penetapan garis delimitasi tahun 1949 disepakati antara Israel dan negara-negara tetangga yaitu Mesir, Lebanon, Jordan dan Syria. Kesepakatan ini mengakhiri permusuhan yang terjadi akibat Perang Arab-Israel 1948. Gencatan senjata di tandatangani tanggal 20 Juli 1949 di mana Suriah dipaksa untuk menahan pasukannya dari area yang dievakuasi dan akan menjadi zona demiliterisasi. Dalam Garis gencatan senjata ini tidak boleh terdapat kekuatan Israel dan kekuatan lain yang bersifat militer. Wilayah Jordan di Tepi Barat dikenal sebagai *Green Line*; PBB mendirikan badan supervisi dan pelaporan untuk memonitor garis gencatan senjata tersebut. Untuk mengamankan perbatasan ini maka terdapat Triparti Deklarasi 1959 antara AS, Inggris dan Perancis dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan dan komitmen untuk perdamaian dan stabilitas, tidak menggunakan kekuatan militer dan oposisi terhadap perlombaan senjata di wilayah tersebut.⁹

Dalam Gambar II dijelaskan bahwa wilayah yang terkena gencatan senjata sesuai dengan garis demiliterisasi. Di wilayah Utara dan Tengah, Suriah lebih diuntungkan dengan garis perbatasan tahun 1923, karena kekuatan militer Suriah lebih jauh masuk ke wilayah Israel. Sedangkan di Selatan, Suriah juga sebenarnya mendapatkan wilayah zona demilitarisasi yang lebih ke dalam wilayah Israel. Namun demikian hal sangat penting bagi Suriah adalah dengan batas 4 Juni 1967, di mana Suriah dapat memperoleh sumber air tidak saja dari Danau Tiberias melainkan juga sepanjang Sungai Jordan. Suriah memperoleh lebar 10 meter dari Tepi Danau Tiberias dengan panjang 12 km. Garis Perbatasan ini menjadi perhatian utama Suriah dan Israel. Dalam

⁸ Ma'oz, Moshe, Can Israel and Syria Reach Peace: Obstacle, Lessons and Prospects, James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University- March 2005. www.bakerinstitute.org/publications/wp_israel (diakses 3 Juli 2011)

⁹ 1949 Armistice Agreements, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/1949_Armistice_Agreements

arti bahwa Suriah tidak akan mengakui garis batas internasional 1923. Suriah hanya mengakui garis batas 4 Juni 1967 sebelum terjadinya perang Arab-Israel tahun 1967. Hal yang paling penting adalah garis batas 4 Juni 1967 terkait dengan masalah air yang dituntut Suriah dan merupakan solusi yang terbaik bagi Suriah untuk mencapai kesepakatan, meskipun pernah terjadi sengketa di sekitar Danau Tiberias.¹⁰

Gambar II.
**Garis Delimitasi Suriah dan Israel berdasarkan
 Zona Demiliterisasi di Empat Daerah**



Sumber : **The Syrian-Israeli Frontier Relevant Lines: 1923, 1949, 1967, Monograph, Middle East Insight, (1999).**

¹⁰ Hof, C. Frederic, The Line of June 4, 1967, <http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsources/Peace/67line.html>

Danau Tiberias merupakan dasar atas sengketa batas antara Suriah dan Israel. Mengingat seringnya terjadi pertikaian maka para penangkap ikan kedua negara maka Israel mencegah pemancingan di ujung Timur Laut Danau dimaksud. Bulan Desember 1955, terjadi penembakan oleh rakyat Suriah kepada patroli Kapal Laut Israel. Mayor Ariel Sharon (pernah menjadi Perdana Menteri 2000-2004) melancarkan serangan besar-besaran ke posisi militer Israel dekat Danau. Serangan ini tidak menghentikan Suriah untuk melakukan penembakan ke nelayan dan tentara Israel.¹¹

Pertikaian kemudian yang muncul antara Suriah dan Israel berkaitan dengan proyek Amerika yaitu *the Eric Johnston Plan 1953*, yang didisain untuk menyalurkan air di Perairan Sungai Jordan (termasuk Yarmuk) antara Israel, Jordan, Syria and Lebanon. Syria menyerang secara verbal, diplomatik dan militer terhadap proyek Israel ke Perairan Sungai Jordan di padang pasir Negev tahun 1958 sebelah Timur Laut Danau Tiberias.¹² Konflik ini terjadi karena kedua negara ingin menguasai sumber mata air di Danau Tiberias. Konflik ini menjadi semakin memuncak ketika pada tahun 1967 Israel menyerang Suriah dan Israel serta Jordan dalam perang enam hari. Israel mampu menguasai wilayah Dataran Tinggi Golan, Sinai, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Ketegangan memuncak ketika Suriah menolak Resolusi DK PBB No. 242 (22 November 1967) sedangkan Israel, Mesir dan Jordan menerimanya. Keadaan ini justru memberikan kesempatan kepada Israel untuk tetap menguasai Golan, tidak bekerjasama atau mengokupasi ke dalam Israel secara *de facto* atau *de jure*. Keadaan ini terus berlanjut meskipun Suriah telah menerima Resolusi DK PBB No. 338 (22 Oktober 1973) yang menyerukan untuk mengimplementasikan Resolusi DK PBB 242.

Konferensi Madrid 1991

Terjadinya serangan Irak ke Kuwait, 2 Agustus 1990 merupakan *a blessing in disguise* atau berkah yang terduga bagi Suriah. Raymond Hinnebusch menjelaskan bahwa Perang Teluk I merupakan kesempatan emas Suriah untuk mendapatkan kredibilitas AS bagi kepentingan regional Suriah. Pertama, Suriah dan Irak memiliki kebijakan yang saling bertentangan. Irak mendukung Jenderal Awn di Lebanon yang merupakan penghalang bagi hegemoni Suriah di Lebanon untuk menghadapi Israel dan bantuan Irak

¹¹ Ibid.

¹² Ibid

terhadap Iqwanul Muslimin yang melakukan pemberontakan di Suriah tahun 1982. Kedua, dengan adanya tanda-tanda bahwa AS akan melakukan upaya ke arah perundingan damai atas konflik Arab-Israel maka Suriah berusaha untuk memanfaatkan perannya agar Irak tidak dapat campur tangan dalam proses perdamaian Suriah dan Israel. Dalam kunjungannya ke Moskow bulan April 1987, Presiden Hafiz al-Assad telah menyampaikan akan melakukan perundingan dengan Israel dan secara tidak langsung mendorong sepuluh ribu Yahudi Rusia imigrasi ke Israel. Ketiga, Secara ekonomi, dengan mendukung Arab Saudi dalam Perang Teluk I maka Suriah tidak akan kehilangan bantuan ekonominya dari negara GCC. Keempat, Suriah tidak mungkin berlawanan dengan negara adidaya untuk merealisasikan tujuannya dalam konflik Arab-Israel. Presiden Hafiz al-Assad ingin agar negara-negara di Timur Tengah dan Barat dapat mengerti bahwa jalan ke arah perdamaian di Timur Tengah melalui Damaskus. Henry Kissinger mengatakan *there can be no war without Egypt or peace without Syria* (Tidak ada perang tanpa Mesir dan tidak ada perdamaian tanpa Suriah). Hal ini sama seperti yang disampaikan Menlu AS James Baker bahwa dalam situasi ini merupakan awal mula suatu kesempatan bahwa Suriah merupakan kunci bagi kemajuan yang signifikan dalam proses perdamaian di Timur Tengah.¹³

Peran AS sebagai sponsor Konferensi Madrid, Spanyol, Oktober 1991 berhasil membawa Presiden Hafiz al-Assad dan Menlu Farouk al-Shara ke Madrid. Konferensi Madrid dilaksanakan melalui pemisahan pembicaraan bilateral antara Israel dan Jordan, Suriah, Lebanon dan Palestina dan negosiasi multilateral antara Israel dan beberapa negara Arab. Perundingan ini merupakan kesempatan yang sangat strategis untuk mengadakan pembicaraan untuk mengatasi konflik Arab-Israel. Namun demikian Menurut Itamar Robinovich, Ketua Negosiasi Israel dalam perundingan di Konferensi Madrid mengatakan *there was only one crucial element missing – the political will by the relevant parties to take advantage of the new framework in order to reach a settlement* (terdapat satu elemen penting yang hilang – kehendak politik oleh kelompok yang relevan untuk mengambil keuntungan dalam kerangka kerja baru dalam rangka mencari suatu penyelesaian). Amerika Serikat hanya menjalankan agendanya sendiri untuk mencari

¹³ Brodsky, RJ Matthew, From Madrid to Geneva: the Rise and Fall of the Syrian-Israeli Peace Process, 1991-2000, Middle East Opinion, 2008. www.middleeastopinion.com/history-&-policy hal. 2-3 . 10.07.2011

pengaruh dikalangan negara-negara Arab. Sedangkan Israel masih terlihat penuh dengan keraguan terhadap keinginan Suriah untuk menyelesaikan konflik. Meskipun perundingan tidak mencapai solusi namun konferensi ini telah mempertemukan antara Israel dan Suriah serta dengan negara-negara yang bersengketa.¹⁴ Dalam pidatonya di Parlemen, 12 September 1994, Presiden Hafiz al-Assad menyatakan:

*Long discussion that lasted for months were held with the American administration, especially with the Secretary of State at that time, James Baker, after which we agreed that the initiative, which had become clear, aimed at building a just and comprehensive peace on the basis of Security Council Resolution 242 and 338, including a political settlement for the rights of the Palestinian people, along with an American assurance that the United States does not endorse the annexation of any part of the territories occupied in 1967, in keeping with a past American position that rejected the application of Israeli law to the Golan. On the basis we took part in the Madrid conference and in the discussion that were held in Washington.*¹⁵

Diskusi yang berjalan lama berbulan-bulan telah diadakan oleh administrasi Amerika Serikat, khususnya dengan Menteri Luar Negeri James Baker setelah kami menyetujuinya inisiatif tersebut, yang telah menjadi jelas, ditujukan untuk membangun keadilan dan perdamaian yang komprehensif berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan 338, termasuk penyelesaian secara politik hak-hak rakyat Palestina, sepanjang ada jaminan Amerika Serikat bahwa AS tidak mendukung pendudukan setiap bagian wilayah yang diduduki tahun 1967, tetap pada posisi AS yang lalu menolak penerapan hukum Israel di Golan. Berdasarkan hal tersebut, kami mengambil bagian pada konferensi Madrid dan diskusi-diskusi yang diadakan di Washington.

Dalam konferensi Madrid terdapat berbagai perbedaan mendasar sehingga kedua pihak antara Suriah dan Israel perlu waktu atau cenderung sulit untuk menyatakan dua gagasan yang sangat berbeda pandangan. Menurut Suriah, kesepakatan akan tercapai bila Israel menerapkan legitimasi internasional dan resolusi DK PBB No. 242 dan 338; mundur dari Dataran Tinggi Golan dengan garis delimitasi 4 Juni 1967; tidak ada pembicaraan rahasia; tidak ada kesepakatan terpisah; perlakuan yang sama sesuai keamanan masing-masing; tanah untuk perdamaian merupakan kunci perdamaian. Sedangkan pihak Israel dengan tegas menuntut yaitu harus ada normalisasi hubungan

¹⁴ Rabinovich, Itamar (2009) Damascus, Jerusalem, dan Washington: The Syrian-Israeli Relationship As A U.S. Policy Issue, www.scps.org/libs/spaw/uploads/files/policy/Syrian_Israel_Relationship_us_policy_eng.pdf . hal. 3-4. 20.06.2010

¹⁵ Mideast Mirror, 12 September 1994, Vol.08, No.175

dengan hubungan diplomatik penuh serta pertukaran duta besar; normalisasi memerlukan pengaturan hubungan perdagangan dan pariwisata; harus ada pengaturan keamanan yang memuaskan; kebutuhan air bagi Israel harus diamankan; penarikan mundur merupakan isu terakhir setelah membahas masalah ekonomi, keamanan, air dan pariwisata; dan kemudian kompromi mengenai kewilayahan.¹⁶

Negosiasi Sebelum Oslo I 1993

Kegagalan konferensi Madrid 1991 mewarnai proses pemilihan umum di mana antara Yitzhak Shamir dan Yitzhak Rabin yang bertarung untuk memperebutkan kursi di Parlemen. Pernyataan Rabin yang mengatakan bahwa mengangkat masalah Golan sama dengan dengan menghapuskan pertahanan Israel telah membuat kecewa Dewan Pemukiman Dataran Tinggi Golan. Pada bulan September 1992, Rabin kembali menyampaikan bahwa Israel siap untuk melaksanakan resolusi DK PBB no. 242 dan 338 di mana menerima kompromi atas beberapa wilayah. Bahkan di bulan Desember, 1992 Rabin mendeklarasi bahwa penarikan mundur akan merefleksikan perdamaian. Secara publik PM Rabin dengan jelas menyampaikan penerimaan penarikan mundur Golan untuk menarik perhatian Suriah dalam negosiasi.¹⁷

Komitmen Israel untuk mundur dari Golan membawa Suriah mengadakan negosiasi di Washington April 1993. Ketua Delegasi Suriah dipimpin oleh Duta Besar Muwafiq Allaf menekankan bahwa Suriah telah siap menerima keinginan Israel berdasarkan perdamaian tetapi setelah menerima komitmen penarikan mundur total. Menurut Rabinovitch, PM Rabin merasa bahwa pernyataan Suriah tidak simetris antara konsensi dan perdamaian penuh. Pernyataan ini merupakan respon dari pernyataan Rabin bahwa penarikan mundur akan merefleksikan perdamaian. Dalam negosiasi tersebut Suriah dengan tangguh menekankan bahwa wilayah untuk perdamaian: *“you give us (our) territory, said Allaf, and we will give you peace.* (kamu berikan kami (kita) wilayah, berkata Allaf, dan kami akan memberikan kepadamu perdamaian. Sebaliknya delegasi Israel menganggap bahwa perdamaian bukan diberikan oleh Suriah. Perdamaian

¹⁶ Jabr, Reem, *American Foreign Policy Towards Syria*, Valeta: University of Malta, 2005 hal. 13-14

¹⁷ Aharon, Yossi Ben, Book Review, *The Brink Peace* by Itamar Rabinovich, *Jurnal Society*, Januari/Februari 2000, hal. 66

merupakan tujuan bersama sedangkan wilayah merupakan salah satu paket dari komponen perdamaian seperti pengaturan keamanan, pembukaan perbatasan, proyek bersama dan sebagainya.¹⁸ Tujuan Israel adalah perdamaian dulu dengan Suriah kemudian baru direncanakan penarikan mundur dari Golan.

Dalam pertemuan dengan Menlu Warren Christopher 3 Agustus 1993 di Wahshington, Komisi Israel menanyakan lebih lanjut bagaimana jika yang dituntut oleh Presiden Hafiz al-Assad mengenai penarikan mundur terlaksana, pertama, apakah Suriah bersedia untuk menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel; kedua, apakah Suriah siap untuk damai penuh termasuk normalisasi hubungan; ketiga, apakah Suriah siap untuk menawarkan elemen-elemen perdamaian sebelum pelaksanaan penarikan mundur. Ketika pertanyaan tersebut disampaikan ke delegasi Suriah, hal yang paling memberatkan bagi Presiden Hafiz al-Assad adalah mengenai normalisasi. Suriah berpendapat bahwa normalisasi bukan suatu persyaratan sesuai dengan resolusi PBB no. 242.¹⁹

Pada tanggal 4 Agustus 1993, Menlu Warren Christopher mengunjungi Suriah dan menyampaikan proposal PM Rabin yang menuntut 5 tahun periode untuk mundur penuh. Pada fase pertama penarikan tidak ada pemukiman yang akan dievakuasi. Presiden Hafiz al-Assad menolak tawaran PM Rabin dengan menanyakan dua pertanyaan kepada Menlu Warren Christopher:

When Rabin Talks of full withdrawal does he mean a withdrawal to the posts Israel held on June 4, 1967? Christopher replied: I have a commitment to a full withdrawal without a specific determination. Does Israel have further claims to any lands it occupied on the Syrian front June 1967, Christopher replied: not as far as I known. (MEMRI, 1 Desember 1999, Special Dispatch No.60)

Ketika Rabin mengatakan penarikan penuh apakah yang dia maksud penarikan pada wilayah yang Israel duduki 4 Juni 1967? Christopher menjawab: Saya telah berkomitment penarikan mundur penuh tanpa penentuan khusus, apakah Israel memiliki tuntutan lain pada wilayah lain yang diduduki pada garis terdepan Suriah Juni 1967, Christopher menjawab: tidak, sejauh yang saya ketahui.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid. hal. 67-68

Menurut Patrick Seale jawaban Christopher tidak memuaskan karena tidak jelas menyebutkan hingga sejauh mana penarikan mundur pasukan Israel. Namun yang tersirat adalah penarikan mundur penuh yang akan dilakukan Israel hanya di wilayah Dataran Tinggi Golan tidak meliputi Gaza dan Tepi Barat. Dalam masalah penarikan mundur, Presiden Hafiz al-Assad tidak diyakinkan apakah penarikan mundur sesuai dengan garis batas 4 Juni 1967 atau garis batas internasional 1923. Dengan garis batas 4 Juni 1967, Suriah akan memperoleh lebih wilayah Dataran Tinggi yaitu lebih dari 18 Km² jika dibandingkan dengan garis batas internasional 1923. Sehingga Suriah dapat memperoleh sumber air di Danau Tiberias.²⁰ Namun demikian Presiden Hafiz al-Assad tidak secara spesifik menolaknya melainkan yang menjadi perhatiannya adalah penolakan atas proposal untuk membangun hubungan diplomatik. Sebaliknya Suriah hanya merespon dengan istilah hubungan damai yang normal. Di samping itu, Suriah tetap menerima dasar pernyataan “*penarikan mundur penuh untuk mengembalikan perdamaian penuh*”. Lebih lanjut, Presiden Hafiz al-Assad menyetujui partisipasi militer internasional dalam pengaturan keamanan. Sedangkan mengenai Jadwal implementasinya, Presiden Assad menawarkan jangka waktu 6 bulan dari pada 5 tahun. Langkah ini dinilai oleh PM Rabin merupakan penolakan penuh atas proposalnya.²¹

Perundingan Pasca Oslo

Pada Juni 1994, PM Rabin menekankan bahwa penarikan mundur sesuai dengan garis batas 4 Juni 1967. Pada 18 Juli 1994, PM Rabin dan Menlu Christopher setuju agar AS menyampaikan kepada Suriah bahwa Israel menerima penarikan mundur dengan batas tersebut. Dalam perjalanan ke Timur Tengah, Presiden Clinton bertemu dengan Presiden Hafiz al-Assad di Damaskus pada 27 Oktober 1994. Secara pribadi, Presiden Assad untuk pertama kalinya mengungkapkan bahwa misi diplomatik Israel dapat berada dengan Suriah selama empat bulan sebelum masa penarikan mundur selesai.²²

Proses negosiasi berlanjut pada bulan Mei 1995, Suriah dan Israel mencapai terobosan ketika mereka bernegosiasi masalah kertas kerja tentang *Aims and Principles of*

²⁰ Pressman, Jeremy, *Mediation, Domestic Politics, and the Israeli-Syrian Negotiations, 1991-2000*, Security Studies 16, No. 3, July-September 2007, hal. 360-365.

²¹ MEMRI, 1 Desember 1999, Special Dispatch No.60

²² Ibid. Pressman, hal. 361

Security Arrangements. Kertas kerja ini tidak mengikat kedua pihak, tetapi kertas kerja tersebut merupakan dasar untuk mencapai kesepakatan atas isu-isu lainnya. Masalah yang paling mengganjal adalah pengaturan keamanan. Suriah menginginkan pengaturan yang seimbang sedangkan Israel menginginkan pola asimetris dalam rangka mengawasi Suriah di Dataran Tinggi Golan. Terdapat dua isu yang dibahas mengenai pengaturan keamanan yaitu pertama, Israel menuntut bahwa stasiun peringatan dini yang berada di Gunung Hermon tetap dipertahankan setelah perjanjian perdamaian ditandatangani. Kedua, PM Rabin menginginkan untuk membatasi penyebaran kekuatan militer Suriah setelah perjanjian perdamaian.²³

Dalam pernyataannya kepada Menlu Warren Christopher, Presiden Hafiz al-Assad menolak tuntutan pertama Israel karena stasiun tersebut merupakan simbol penjajahan. Dalam tuntutan kedua, Suriah dengan keras menolaknya karena telah membatasi ruang gerak militer Suriah dengan membagi atas 4 zona – satu zona tanpa kekuatan militer, zona kedua pembatasan kekuatan militer, zona ketiga hanya dua divisi militer Suriah diperbolehkan dan terakhir hanya untuk bandara militer. Patrick Seale menggambarkan bahwa tuntutan pengaturan keamanan adalah sebagai bagian untuk mempertahankan hegemoni militer Israel dalam jangka panjang. Menurutnya Suriah tidak akan mungkin menginginkan perdamaian yang hanya akan meningkatkan superior regional Israel melalui keuntungan strategis.²⁴ Namun demikian kedua negara sangat optimis untuk dapat mengatasi perbedaan tersebut. Akhirnya Suriah tidak lagi mendesak mengenai kesamaan dan simetrik penarikan mundur kekuatan militer Suriah dan Israel di Dataran Tinggi Golan. Hal ini disebabkan karena Suriah memiliki wilayah yang lebih luas dari Israel dan memberikan kesempatan atau momentum yang baik dalam proses negosiasi Suriah-Israel. Israel berpendapat bahwa simetrik mundurnya kekuatan militer Israel akan mengosongkan sebagian besar porsi kekuatan militer Israel di bagian utara. Akhirnya pada tanggal 22 Mei 1995 versi akhir kertas kerja tersebut selesai dan mendepositokan ke AS.²⁵

E. Pembicaraan di Wye Plantation

²³ MEMRI: 2 Desember 2009

²⁴ MEMRI: 2 Desember 2009

²⁵ Nejad, Ahmad Soltani (2006) *the Ineffective Role of the United States in the Syrian-Israeli Peace Process During the 1990s*, J. Humanities, Vol.13 (I). hal. 128

Dalam waktu empat bulan kemudian, tanggal 4 November 1995, PM Rabin dibunuh dan Shimon Peres menjadi Acting Perdana Menteri Israel. Prospek perdamaian antara Suriah dan Israel kembali redup. Namun pada 27-29 Desember 1995, Suriah dan Israel kembali memulai negosiasi di Wye Plantation, Maryland di bawah mediasi AS, untuk mengakhiri *state of war* dan pengaturan waktu serta keamanan penarikan mundur Israel dari Dataran Tinggi Golan. Suriah dan Israel masing-masing diwakili oleh Dubes Walid al-Muallem, Dubes Suriah untuk AS dan Uri Savir, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel, sedangkan Tim AS dipimpin oleh Dennis Ross, Utusan Khusus Timur Tengah.

Pada pembicaraan kedua yang terjadi pada 24-26 Januari dan 29-31 Januari 1996, Israel meluaskan pembicaraan secara luas seperti negosiasi yang dilakukan dengan Jordania, padahal menueurt Suriah mengenai isu-isu seperti air dan kerja sama ekonomi akan dirundingkan setelah Israel komitmen untuk mundur dari Dataran Tinggi Golan. Untuk mengatasi perbedaan, Menlu Warren Christopher melakukan diplomasi ulang-alik pada Februari 1996 di kedua negara adalah untuk menengahi perbedaan kedua pandangan tersebut. Akhirnya pada tanggal 27-29 Februari 1996 kedua negara sempat mengadakan pembicaraan, namun pembicaraan selanjutnya yang dijadwalkan pada minggu berikutnya digagalkan oleh Israel pada 4 Maret 1996. Dubes Walid Moualem menjelaskan:

We complete 75 percent of the work of negotiating an agreement. We agreed that there would be a complete Israeli withdrawal, to be implemented in two stages – though there was still a gap on the total implementation time, with them requiring three years, and us offering sixteen months. Regarding security arrangement, we agreed there would be early warning from air and space; zones of demilitarization and zones of limited forces in the area from Quneitra to Safad, that is, the relevant areas – though we still disagreed on the types and precise locations of these deployments. We even agreed on some confidence-building measures. Regarding normalization, I agreed nine of the fifteen elements that were on the table.²⁶

Kami menyelesaikan 75 persen upaya negosiasi untuk perjanjian. We setuju bahwa terdapat penarikan mundur Israel secara komplit, dan akan diimplementasikan dalam dua tahap – tetapi terdapat perbedaan mengenai waktu implementasinya secara keseluruhan, mereka memerlukan tiga tahun dan kami menawarkan enam belas bulan. Berkaitan dengan pengaturan keamanan, kami setuju bahwa terdapat pendeteksian dini dari udara dan angkasa dari Quneitra ke

²⁶ Ibid, hal. 132

Safad, bahwa ini merupakan kawasan yang relevan – tetapi kami tetap tidak setuju mengenai tipe dan ketepatan lokasi penempatannya. Kami setuju beberapa tindakan pembangunan kepercayaan diri. Berkaitan dengan normalisasi, saya setuju sembilan butir dari lima belas elemen yang disampaikan dalam negosiasi.

Dua isu yang sangat penting dalam pembicaraan di Wye Plantation adalah keadaan damai dan isu ekonomi. Kondisi damai penuh oleh Suriah sedikitnya terdiri dari tiga masalah. Pertama, pengakhiran perang; Kedua, keseimbangan pengaturan keamanan; Ketiga, adalah finalisasi perselisihan perbatasan. Suriah menegaskan bahwa perdamaian penuh meliputi hubungan damai tetapi tidak perlu persahabatan dan normalisasi. Suriah berpendapat bahwa negaranya mengadakan perdamaian dengan banyak negara tetapi hanya beberapa negara yang memiliki hubungan sangat dekat. Sebaliknya Israel mengharapkan bahwa perdamaian penuh tidak sekedar hanya hubungan yang normal. Israel menginginkan agar Suriah mengakhiri hubungan baik dengan Iran, menghalangi militan Islam di negara tetangga Lebanon dan menutup markas kelompok Palestina di Damaskus.

Pembicaraan di Washington

Setelah Suriah dengan serius melakukan negosiasi dengan PM Yitzhak Shamir, PM Yitzhak Rabin dan PM Shimon Perez maka negosiasi mendapatkan angin segar kembali setelah PM Ehud Barak dapat mengalahkan PM Netanyahu pada 17 Mei 1999. Optimisme kembali ke puncak ketika seorang jurnalis Inggris, Patrick Seale (orang kepercayaan Presiden Suriah) berkunjung ke Israel sebelum PM Ehud Barak disumpah menjadi PM. Pesan PM Ehud Barak kepada Presiden Suriah, bahwa Barak menekankan bahwa kegagalan negosiasi dengan Rabin adalah kesempatan yang terlewatkan karena adanya kesalahpahaman posisi Israel. Bahkan dari laporan yang disampaikan bahwa sangat jarang Presiden Assad memuji PM Barak dan menggambarkannya sebagai seorang yang tegas dan jujur yang ingin damai dengan Suriah. Suriah menginginkan agar pembicaraan dimulai dari masalah di mana mereka berhenti negosiasi. Suriah menegaskan kembali bahwa Israel tetap harus mundur pada batas 4 Juni 1967.²⁷

²⁷ Carmon, J dan Feidner, Y (1999) Israel-Syrian Negotiation, Part I: From Hope to Impass, MEMRI, 12 Agustus 1999, www.memri.org/report/en/print286.html 23.03.2010.

Kemenangan PM Ehud Barak disambut baik oleh Pemerintahan Clinton dengan memberikan kesempatan untuk memfasilitasi proses perdamaian. PM Barak menyampaikan bahwa:

*There is no doubt that Presiden Assad has shaped the Syrian nations. His legacy is strong, independent, self-confident Syria... a Syria which, I believe, is very important for the stability of the Middle East. The only way to build a stable, comprehensive is through an agreement with Syria. That is the keystone of peace... His policy is to strengthen the security of Israel by putting an end to the conflict with Syria.*²⁸

Tidak ada keraguan bahwa Presiden Assad telah menentukan bangsa Suriah. Warisannya adalah kuat, merdeka, percaya diri Suriah... Suriah di mana, saya percaya, adalah penting bagi stabilitas Timur Tengah. Hanya jalan untuk membangun kestabilan, komprehensif adalah melalui perjanjian dengan Suriah. Hal itu merupakan pijakan perdamaian. Kebijakannya adalah untuk memperkuat keamanan Israel dengan mengakhiri konflik dengan Suriah.

Setelah terjadi pembicaraan antara Menlu Madeline Albright dan Presiden Hafiz al-Assad awal Desember 1999, maka tanggal 8 Desember 1999, Presiden Clinton mengumumkan bahwa Suriah dan Israel setuju untuk memulai negosiasi dari masalah terakhir yang dibahas, tanpa ada persyaratan. Selain itu adalah rencana Israel untuk menarik mundur dari Lebanon Selatan yang disampaikan dalam kampanyenya dengan atau tanpa perjanjian dengan Suriah. Keinginannya untuk menarik mundur pasukannya dari Lebanon telah memperlunak Suriah untuk kembali ke meja perundingan. Dalam pidatonya PM Barak menyampaikan akan memulai melakukan negosiasi dengan Suriah dan berhasil menyakinkan Suriah melalui Presiden Clinton bahwa Israel akan mundur dari Dataran Tinggi Golan maka membuat Wakil Presiden Suriah Abdul al-Halim Khadam menyampaikan kepada pimpinan organisasi Palestina dan Hezbollah untuk mempersiapkan senjata terhadap Israel.²⁹

Negosiasi di Washington yang dilakukan oleh Menlu Suriah Farouk al-Shara dan PM Ehud Barak merupakan hasil suatu kesepakatan dari AS sebagai mediasi bahwa PM

²⁸ ²⁸ Nejad, Ahmad Soltani, *The Syrian-Israeli Peace Process and the United States from Hope to Impass 1991-2000*, Belgia:Universiteit Gent, 2004, hal. 56

²⁹ Carmon. J dan Feidner, Y, *Israel-Syrian Negotiation, Part I: From Hope to Impass*, MEMRI, 12 Agustus 1999, www.memri.org/report/en/print286.html 23.03.2010.

Barak telah menerima tawaran penyerahan wilayah dengan jaminan keamanan dan isu-isu lainnya. Pertemuan di Shepherdstown tanggal 3 Januari 2000 dibicarakan bahwa keamanan harus pertama dibahas, sedangkan Suriah mendesak bahwa penarikan mundur Israel dari Dataran Tinggi Golan harus dibahas dahulu sebelum membahas isu-isu lainnya. Kedua pihak tidak dapat mencapai kompromi. Dalam hal ini AS menawarkan empat komisi teknis yang akan membahas isu-isu terkait seperti perbatasan/penarikan mundur, pengaturan keamanan, air dan normalisasi hubungan. Menlu Farouk al-Shara mengatakan bahwa

*Peace for Syria means the return of all its occupied land. While for Israel, peace will mean the end of the psychological fear which the Israelis have been living in as a result of the existence occupation which is undoubtedly the source of all adversities and wars.*³⁰

Damai untuk Suriah maksudnya pengembalian seluruh wilayah yang diduduki. Sedangkan untuk Israel, damai maksudnya mengakhiri ketakutan psikologis di mana rakyat Israel telah hidup sebagai hasil dari keberadaan pendudukan yang tidak diragukan lagi merupakan sumber dari permusuhan dan perang.

Dalam pertemuan di Shepherdstown telah dikeluarkan dokumen tujuh halaman yang ditulis oleh pemerintah AS sebagai suatu draft perjanjian perdamaian Suriah dan Israel.³¹ Draft ini merupakan resume dari isu-isu di mana Suriah dan Israel telah menyetujuinya dalam negosiasi sebelumnya dan perbedaan-perbedaan yang perlu dipecahkan. Dalam draft tersebut disebutkan bahwa kedua pihak setuju mengakhiri keadaan perang dan membangun perdamaian. Suriah telah menunjukkan fleksibilitas dalam beberapa isu seperti pengaturan keamanan dan hubungan normalisasi. Di bidang keamanan kedua pihak telah setuju untuk pada area pembatasan kekuatan militer dan kemampuannya. Namun terdapat ketidaksetujuan dalam zona demiliterisasi yaitu Suriah mendesak adanya kesamaan jarak dari garis perbatasan sedangkan Israel menginginkan zona demilitarisasi lebih luas ke wilayah Suriah.

³⁰ Op.,Cit. Nejad, hal. 163.

³¹ A Framework for Peace between Israel and Syria, Draft perjanjian damai yang disampaikan oleh pemerintahan Clinton kepada Israel dan Suriah di Shepherdstown, W. VA, tanggal 8 Januari 2000 ([http://www.mideastinfo.com/documents/golan_treaty .htm#Relations](http://www.mideastinfo.com/documents/golan_treaty.htm#Relations)) 23.06.2011

Di bidang keamanan, Suriah setuju ditempatkan stasiun peringatan dini di Gunung Hermon yang dioperasikan oleh AS dan Perancis. Meskipun pada awal perundingan Suriah menolak penempatan stasiun tersebut karena peralatan teknis seperti satelit AS akan menyediakan bagi Israel informasi yang cukup atas pergerakan militer Suriah. Draft dokumen juga mengindikasikan pengakuan masing-masing atas kedaulatan, wilayah dan integritas serta kemerdekaan dan hak untuk hidup damai di dalam batas wilayah yang aman dan diakui. Masing-masing pihak akan membangun hubungan diplomatik dan hubungan konsuler termasuk pertukaran duta besar. Mereka setuju untuk mempromosikan ekonomi dan perdagangan bilateral termasuk bebas arus masyarakat, barang dan pelayanan antar kedua negara. Di samping itu mereka setuju untuk mempromosikan kerjasama di bidang pariwisata.³²

Konferensi Tingkat Tinggi di Jenewa

Perundingan damai Suriah-Israel menuju terang ketika pada tanggal 27 Februari 2000, PM Barak secara umum mengkonfirmasi atas komitmennya terhadap pernyataan PM Rabin tahun 1993 (Rabin deposit) yang menyetujui penarikan mundur dari garis batas 4 Juni 1967 sebagai dasar pembicaraan antara Suriah dan Israel. (New York Times, 23 Maret 2000). Sebelumnya keputusan ini sangat berat karena rakyat Israel menginginkan perdamaian dengan Suriah tetapi tidak setuju untuk mundur dari Dataran Tinggi Golan. Pada Desember 1999 hanya 13% rakyat Israel yang setuju mundur dari Dataran Tinggi Golan. Pada awal Januari 2000, rakyat Israel yang setuju menjadi 49%. Dalam kaitan ini PM Ehud Barak kembali dari komitmennya untuk tidak membahas batas 4 Juni 1967. Menurut Presiden Clinton, di Shephersdtown, jurang perbedaan antara Suriah dan Israel tidak terlalu besar. Suriah sebenarnya telah setuju bahwa Israel akan mempertahankan jalur lebar 10 meter sekitar Danau Tiberias dan bahkan dengan jalur lebar 50 meter sesuai dengan negosiasi garis delimitasi 4 Juni 1967.

Dalam perundingan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Jenewa, 26 Maret 2000, Presiden Clinton menjelaskan persyaratan maksimum Israel untuk membuat perdamaian dengan Suriah. Dua keinginan Israel adalah menguasai seluruh air (termasuk Danau Tiberias dan Sungai Jordan) dan mengontrol wilayah ratusan meter sebelah Timur Danau Tiberias. PM Barak sebenarnya telah memberikan kompensasi kepada Israel di

³² Washington Post, 1 Januari 2000

wilayah al-Hima (Hamat Gader) beberapa kilometer Tenggara Danau yang merupakan kedaulatan Israel secara hukum internasional dan pernah diduduki Suriah pada tahun 1951. Tuntutan ini tidak dapat diterima oleh Suriah. Presiden Hafiz al-Assad menolak permintaan ini. Menurut Patrick Seale:

The summit never recovered from this unfortunate start. It turned into a fiasco damaging Assad's hitherto friendly relations with American President. Assad returned home in a sour mood. He felt he had been tricked. (Nejad, 2006:59)

KTT tidak pernah menghidupkan kembali dari permulaan yang tidak sepaham. Hal ini kembali menjadi bencana yang merusak hubungan persahabatan Assad dengan Presiden Amerika Serikat. Presiden Assad kembali ke negaranya dengan rasa kekecewaan. Dia merasa tertipu.

Pada perundingan di Jenewa 2000, Suriah telah memberikan konsensi untuk melakukan normalisasi hubungan, setuju untuk melakukan pengaturan air bersama, setuju untuk menempatkan stasiun peringatan dini di bawah pengawasan AS dan Perancis dan lainnya yang sangat fleksibel. Semua konsensi bisa ditawarkan kecuali wilayah Dataran Tinggi Golan. Wilayah tersebut merupakan simbol kedaulatan dan kemerdekaan. Tidak ada tawar-menawar untuk memberikan seicipun kepada Israel. Kegagalan ini disinyalir karena penasihat PM Barak telah memberikan masukan yang salah bahwa ketika Presiden Hafiz al-Assad dalam kondisi yang kurang sehat maka Suriah akan dapat ditekan untuk memberikan konsensi wilayah di sekitar Danau.³³

Kesimpulan

Negosiasi dengan batas internasional 4 Juni 1967 mengalami kegagalan karena secara regional masalah wilayah tersebut menjadi faktor penting bagi keamanan wilayah dan sumber air bagi Israel. Provokasi penembakan atas wilayah Israel dapat dengan mudah dilakukan melalui Dataran Tinggi Golan. Peran Suriah di wilayah yang berbatasan dengan Lebanon dan memiliki hubungan dekat dengan Hezbollah dan faksi-faksi Palestina di Damaskus menjadi faktor pertimbangan politik bagi Israel untuk mundur dari batas 4 Juni 1967. Penolakan Israel atas wilayah tersebut merupakan ketidakpercayaan

³³ Pipes, Daniel (2000), Syria-Lebanon-Israel Triangle: The End Of The Status Quo?, Washington Institute Soref Symposium, May 19, 2000, www.danielpipes.org/959/syria-lebanon-israel-triangle-the-end-of-the-status-quo 5.08.2011

Israel atas Suriah dan keinginan Israel untuk menguasai sumber mata air di Danau Tiberias secara penuh.

Biografi

Nama : Windratmo Suwarno
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 20 September 1970
Agama: Islam
Istri dan anak : 1 (satu) dan 2 (dua) orang anak
Pendidikan

- Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional 1995
- Magister Kebijakan Publik, Univ. Indonesia 1998
- Calon Doktor Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Kajian Timur Tengah, Universitas Gadjah Mada.

Pengalaman Kerja

- Staf di Pusat Politik Badan Litbang Deplu 1996-2000
- KJRI Jeddah 2000-2004
- Kasubbid Eropa Tengah & Timur BPPK 2004-2006
- KBRI Damaskus 2006-2010
- Fungsional di Setditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri
